

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 15 Agustus 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman 3)	Kamis, 15 Agustus 2019	Akses ke Candi Borobudur Disiapkan	Jalan tol Solo-Jogja disiapkan untuk tersambung dengan jalan tol Jogja-Bawen berikut pembangun akses menuju Candi Borobudur.
2	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Kamis, 15 Agustus 2019	Rel KAI Jadi Basis Pengembangan	Pemerintah semakin mantap dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) mengusulkan agar dalam pengembangannya nanti, ibu kota itu dibangun dengan berbasis rel.
3	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Kamis, 15 Agustus 2019	ADHI Garap Konstruksi Segmen B	PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kembali menggarap pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta Tahap I Semanan—Sunter—Pulo Gebang. Perseroan mendapat kontrak konstruksi pada segmen B Semanan—Grogol senilai Rp1,28 triliun.
4	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Kamis, 15 Agustus 2019	KPBU Perumahan Terus Digenjot	Pemerintah berupaya mengurangi defisit perumahan dengan dana yang terbatas. Salah satu yang digenjot akhir-akhir ini adalah skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam menyediakan rumah rakyat.
5	Media Indonesia (Halaman 13)	Kamis, 15 Agustus 2019	Gandeng Swasta demi Atasi Defisit Perumahan	Kementerian PUPR akan memangkas angka defisit atau backlog perumahan dari saat ini 7,6 juta unit menjadi 5 juta unit pada 2024.
6	Koran Tempo (Halaman ekonomi bisnis)	Kamis, 15 Agustus 2019	PINA Tawarkan 30 Proyek Strategis	Lembaga PINA Bappenas menggenjot penawaran 30 proyek energy, industry strategis, perkebunan dan manufaktur, hingga perumahan.

Judul	Akses ke Candi Borobudur Disiapkan	Tanggal	Kamis, 15 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 3)		
Resume	Jalan tol Solo-Jogja disiapkan untuk tersambung dengan jalan tol Jogja-Bawen berikut pembangun akses menuju Candi Borobudur.		

► KONEKTIVITAS JALAN TOL

Akses ke Candi Borobudur Disiapkan

Bisnis, JAKARTA – Jalan tol Solo-Jogja disiapkan untuk tersambung dengan jalan tol Jogja-Bawen berikut pembangun akses menuju Candi Borobudur.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sudah mengirimkan surat permohonan penetapan lokasi (penlok) untuk proyek tol Solo—Jogja dan selanjutnya menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum dilakukan pelelangan.

Sugiyartanto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengatakan dengan tersambung jalan tol Solo—Jogja dan Jogja—Bawen, bakal ada akses ke Candi Borobudur dari jalan tol tersebut.

“Iya [tersambung] ke Borobudur, tetapi akses ke Borobudur itu tol yang Bawen—Jogja, bukan tol Solo—Jogja,” ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (14/8)

Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut jalur tol Solo—Jogja akan tersambung hingga Borobudur. “Jogja—Solo sampai Borobudur. Dulu hanya Jogja—Solo. Itu sudah disepakati,” kata Sultan seperti dikutip *Solopos.com*.

Dari Solo, jalur tol masuk dari kawasan Manisrenggo menuju ke jalan lingkaran Timur berdekatan dengan kawasan Lottemart (Maguwoharjo). Dari sana, jalur tol bersambung secara melayang di atas jalan lingkaran hingga kawasan *Westlake (Ringroad Barat)*.

“Dari Manisrenggo masuk dekat Lottemart. Baru *elevated*, sambung ke *Ringroad* bablas ke Barat di atas *Ringroad*. Nanti sebelum Kavaleri, Demak Ijo itu motong sampai di atas selokan Mataram [layang]. Baru kemudian masuk ke Muntilan,” papar

Sultan.

Sepanjang selokan Mataram, jalur tol dibuat melayang hingga masuk wilayah Muntilan, Jawa Tengah. Dari jalur Muntilan ini, kata Sultan, baru melewati jalan darat. Di wilayah ini dilakukan pembebasan tanah oleh Pemprov Jateng hingga kawasan Borobudur.

Selain jalur tol tersebut, Sultan menjelaskan adanya jalan tembus yang mendukung jalan tol. Salah satunya jalan tembus dari Sentolo menuju Muntilan (Borobudur). Jalan tersebut termasuk jalur Jogja Outer Ring Road (JORR) yang bisa tembus ke Muntilan atau tembus jalan tol Jogja—Borobudur. Begitu juga dengan akses jalan dari Temon yang melewati Suroloyo diharapkan bisa menjadi satu dengan jalur jalan Sentolo, Muntilan.

Prakarsa pekerjaan Tol Solo-Jogja—Kulonprogo telah dikantongi PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Cama Group, dan PT Daya Mulia Turangga. Adapun, jalan tol sepanjang 91,93 kilometer ini bakal menelan investasi Rp22,54 triliun.

Sugiyartanto menjelaskan, tol Solo—Jogja dan tol Bawen—Jogja bakal tersambung, kendati ada dua wilayah administratif, yakni DIY dan Jawa Tengah sehingga dibedakan dari wilayahnya. Jalan tol tersebut tidak akan tersambung langsung menuju ke bandara Yogya International Airport (YIA).

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan pihaknya masih menunggu Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menerbitkan surat permohonan penetapan lokasi untuk tol Solo—Jogja agar bisa segera dilelang. “Izin penlok dari pak Dirjen [Bina Marga] belum terbit.” (*Krizia Putri Kinanti*)

Judul	Rel KAI Jadi Basis Pengembangan	Tanggal	Kamis, 15 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Pemerintah semakin mantap dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) mengusulkan agar dalam pengembangannya nanti, ibu kota itu dibangun dengan berbasis rel.		

► IBU KOTA BARU

Rel KA Jadi Basis Pengembangan

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah semakin mantap dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) mengusulkan agar dalam pengembangannya nanti, ibu kota itu dibangun dengan berbasis rel.

Sekretaris Jenderal IAP Andy Simarmata mengharapkan bahwa pengembangan IKN dan kota-kota baru ke depan agar berbasis rel dan mengandalkan kereta sebagai transportasi utama.

“Kota berbasis rel itu bukan maksudnya harus ada LRT, tetapi mengandalkan kereta. Jadi dari dulu sebenarnya kan sudah diarahkan, karena *satelit city* itu hanya bisa ditempuh berbasis rel atau jalan tol. Kalau jalan biasa, nanti antarkota malah saling menyatu seperti Jakarta dengan Depok,” ungkapnya kepada *Bisnis*, Selasa (13/8).

Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan lahan melalui mekanisme bank tanah atau konsolidasi lahan, agar nanti warga yang kelas

menengah ke bawah tetap bisa memiliki rumah.

“Jadi kalau sekarang ternyata tanah-tanah sudah dimiliki *developer*, ya harganya pasti jadi tinggi dengan rencana pindah ibu kota dan pengembangan kota-kota baru itu.”

Andy menuturkan, pengembangan IKN nantinya juga agar bisa lebih hijau dari negara lain. Ketika negara lain harus menanam pohon untuk membuat ibu kotanya lebih hijau, Indonesia sudah hijau alami lebih dulu.

“Itu nanti konsep yang kita tawarkan dengan nama *Urban Nature*, harmoni antara alam dengan lingkungan binaan, itu konsep yang diajukan dalam kongres *Isocarp* bulan depan,” ungkapnya.

IAP dalam waktu dekat melalui kongres *Isocarp* akan mengundang sejumlah negara sebagai percontohan pengembangan IKN nanti. Andy menyebutkan ada 3 negara yang dijadikan contoh, yaitu Korea Selatan, Malaysia, dan Australia.

“Nanti misalnya Malaysia

kita bisa ambil contoh itu pengelolaan kotanya, dia buat badannya sendiri untuk mengurus persiapan kota baru. Kemudian, Australia bisa kita contoh untuk kelembagaannya. Kalau yang dari Korea Selatan bagaimana perancangan kotanya yang *high tech*.”

Chairman Local Committee dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Bernardus Djonoputro mengatakan, acara *International Society of City and Regional Planners (Isocarp)* ini akan dihadiri oleh sekitar 500 pakar dan perencana kota dunia dari 40 negara termasuk Indonesia.

Acara yang berlangsung 5 hari pada 9-13 September 2019, akan mendiskusikan masa depan perencanaan kota dan metropolitan dunia, termasuk pembahasan terkait perencanaan kota baru dan IKN.

Kongres itu, katanya, diharapkan bisa menjadi promosi dunia akan perencanaan kota di Indonesia, sebagai negara maritim di khatulistiwa, serta ragam budaya di 17.000 lebih pulau. *(Mutia Nabila)*

Judul	ADHI Garap Konstruksi Segmen B	Tanggal	Kamis, 15 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kembali menggarap pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta Tahap I Semanan—Sunter—Pulo Gebang. Perseroan mendapat kontrak konstruksi pada segmen B Semanan—Grogol senilai Rp1,28 triliun.		

► TOL DALAM KOTA TAHAP I

ADHI Garap Konstruksi Segmen B

Bisnis, JAKARTA — PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kembali menggarap pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta Tahap I Semanan—Sunter—Pulo Gebang. Perseroan mendapat kontrak konstruksi pada segmen B Semanan—Grogol senilai Rp1,28 triliun.

Direktur Keuangan Adhi Karya Entus Asnawi mengatakan Adhi Karya tidak sendiri dalam mengerjakan konstruksi jalan tol sepanjang 9,5 kilometer itu. Perusahaan bersandi saham ADHI itu bermitra dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. “Porsi ADHI di KSO [Kerja Sama Operasi] 30% untuk seksi B,” jelas Entus kepada *Bisnis*, Rabu (14/8).

Berdasarkan laporan keuangan ADHI per Juni 2019, kontrak konstruksi tol dalam kota Jakarta segmen B turut mempertebal raihan kontrak perseroan di sektor jalan tol. Sebelumnya di akhir 2018 lalu, ADHI juga meraup kontrak pembangunan jalan tol Banda Aceh—Sigli senilai Rp7,63 triliun.

Di proyek jalan tol dalam kota yang konsesinya dipegang PT Jakarta Tollroad Development (JTD), ADHI juga sudah terlibat dalam pembangunan segmen

A Pulo Gebang—Sunter senilai Rp2,47 triliun. Di segmen tersebut, ADHI bermitra dengan Jaya Konstruksi dan pekerjaan konstruksi sudah dimulai pada 2017 lalu.

Direktur Utama JTD Frans Sunito sebelumnya mengatakan kontrak konstruksi untuk segmen B telah diteken dengan nilai Rp4 triliun. Kendati kontrak telah diteken, konstruksi baru akan dimulai pada September 2019 setelah proses talangan lahan tuntas.

Pada pertengahan Juli 2019 lalu, JTD sudah menekan nota kesepahaman dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terkait pengembalian talangan lahan. “Karena sudah ada MoU, kami proses dulu [pinjaman] ke bank. Kami mulai [konstruksi] di September.”

Di sisi lain, progres konstruksi segmen A Pulo Gebang—Sunter telah melampaui 50%. Segmen sepanjang 9,3 kilometer ini dijadwalkan rampung pada awal 2020. Jalan tol dalam kota Jakarta tahap I terbagi menjadi tiga segmen dengan total panjang 31 kilometer. Frans menerangkan, JTD mengikuti standar ketahanan gempa terbaru pada desain konstruksi jalan tol dalam kota, sehingga ada eskalasi biaya konstruksi.

Pada perkembangan lain,

rencana ADHI menginisiasi proyek kereta lingkaran Jakarta atau *loopleftine* selangkah lebih maju. Direktur Operasi II Adhi Karya, Pundjung Setya Brata mengatakan pihaknya telah merampungkan prastudi kelayakan terkait proyek tersebut.

“Saat ini pra FS [*feasibility study*] sudah selesai dan sedang di-review oleh BPTJ [Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek],” ujarnya kepada *Bisnis*.

Bila evaluasi dari BPTJ menyatakan prastudi ADHI layak untuk dilanjutkan, ADHI bakal membuat studi kelayakan sebagai modal usulan badan usaha. Dalam rencana prakarsa ini, ADHI juga bermitra dengan WIKA dan Jaya Konstruksi.

Pundjung sebelumnya mengatakan, proyek kereta *loopleftine* akan dibuat dengan konstruksi melayang sepanjang 26 kilometer. Jalur kereta dibuat melingkar, meliputi Manggarai—Tanah abang—Kampung Bandan. Trase ini diperkirakan akan menjadi tumpuan mobilitas penumpang dengan kapasitas 500.000 per hari.

Bila terealisasi, kereta lingkaran akan menambah kapasitas angkutan massal di Jakarta sekaligus terpadu dengan moda angkutan berbasis rel maupun bukan rel. (*Rivki Maulana*)

Judul	KPBU Perumahan Terus Digenjot	Tanggal	Kamis, 15 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Pemerintah berupaya mengurangi defisit perumahan dengan dana yang terbatas. Salah satu yang digenjot akhir-akhir ini adalah skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam menyediakan rumah rakyat.		

► PEMBIAYAAN HUNIAN TERJANGKAU

KPBU Perumahan Terus Digenjot

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah berupaya mengurangi defisit perumahan dengan dana yang terbatas. Salah satu yang digenjot akhir-akhir ini adalah skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam menyediakan rumah rakyat.

Putri Z. Salsabila
redaksi@bisnis.com

Pada 2019, Kementerian PUPR menargetkan capaian program sejuta rumah sebanyak 1,25 juta rumah. Status per 5 Agustus 2019, baru tercapai 735.547 unit.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan bahwa *backlog* kepemilikan telah mencapai 7,6 juta unit. Apabila setiap unit rumah butuh biaya Rp100 juta, maka total dana yang diperlukan sebesar Rp780 triliun.

"Padahal bujet pemerintah tidak lebih dari sepertiganya," tuturnya pada saat acara Workshop Public Private Partnership (PPP) For Affordable Housing di kantor Kementerian PUPR Rabu (14/8).

Pemerintah, katanya, berharap hal ini dapat diatasi dengan pola KPBU yang dapat dilakukan secepat mungkin guna menyelesaikan defisit rumah, melalui pengembangan perkotaan dengan hunian vertikal serta perkembangan kota baru.

Eko mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan beberapa tahapan dalam pencarian lahan yang akan

► Pemerintah tengah melakukan telaah program KPBU yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Kenya dan India.

dicanangkan sebagai kerja sama dalam skema KPBU.

Dia mengatakan, bahwa pihaknya telah mempersiapkan tiga rencana pencarian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan MBR di lahan perkotaan yakni lahan milik pemerintah, lahan hasil konsolidasi dengan meningkatkan pembangunan kembali wilayah *slum* area yang berada di pusat kota serta kerja sama dengan swasta.

"Ini adalah *kick off* kita, sehingga kita berharap pada 2020 nanti sudah ada transaksi kerja sama dan kami berharap 2020 nanti sudah ada lelang, untuk saat ini baru persiapan."

Eko mengatakan bahwa pihaknya akan fokus terhadap perumahan MBR. Meskipun demikian, pihaknya masih mencari formula untuk mengondisikan berapa banyak jumlah rumah MBR yang dapat dicampur dengan komersial.

"Kalau dalam proyek ini jika semuanya adalah MBR tidak akan ada *cross subsidinya*, jadi nanti kita temukan formulanya," ujarnya.

Selain itu, Heri menambahkan bahwa pemerintah tengah menelaah program-program KPBU yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Kenya dan India.

"Kenya telah menciptakan hampir dua ribu sekian unit dan serta india yang sudah *mature* [terkait pengaplikasian program] KPBU nya," ujarnya.

Eko menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan studi pendahuluan

terhadap 4 proyek KPBU yakni KPBU Pasar Sekanak Palembang (tanah Pemda), KPBU Gang Waru Pontianak (tanah Pemda), KPBU Paldam Bandung (tanah pengembang), dan KPBU Cisaranten (tanah Kementerian PUPR).

CARI LAHAN

Terkait dengan pencarian lahan, Lana Winayanti, Ahli Keuangan Perumahan, mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan percepatan dalam pencarian lahan dan kerja sama, termasuk dalam melakukan kerja sama kepada pihak PT KAI yang memiliki banyak lahan di sekitar stasiun mereka.

"Menurut saya, pemerintah jangan menunggu pengumuman informasi terkait kepemilikan lahan, tetapi harus segera mengambil keputusan. Apabila melihat lahan kosong, segera mengecek ke pemda apakah berada di wilayah jalur kuning atau hijau," ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP Realestat Indonesia Totok Lusida mengharapkan pemerintah juga melibatkan pengembang kecil dalam program KPBU.

"KPBU itu bagus tapi pelaksanaannya jangan memilih hanya untuk pengembang besar, pengembang kecil juga," ujarnya pada *Bisnis*.

Menurutnya, tujuan dalam penggunaan KPBU adalah untuk

membantu dan mempercepat pembangunan penyediaan rumah untuk MBR. Dengan demikian, apabila bekerja sama dengan para pengembang kecil, KPBU sangat membantu dalam biaya pembangunan mereka.

Di sisi lain, Totok juga berharap program KPBU tidak harus terburu-buru direalisasikan, tetapi dia berharap KPBU dapat terprogram jangka panjang dengan baik.

Senior Urban Economist and Coordinator of The World Bank Indonesia Urban Program, Marcus Lee menjelaskan, salah satu tantangan bagi Indonesia saat ini adalah bertambahnya jumlah penduduk dan permukiman di sejumlah tempat, khususnya di perkotaan.

Dia menyebut, solusi berupa perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersubsidi, yang kebanyakan masih dibangun jauh dari pusat keramaian dan perekonomian yang ada, membuat program tersebut kurang berjalan dengan optimal.

"Hal itulah yang membuat pertimbangan MBR untuk membeli rumah-rumah dengan harga terjangkau itu masih belum maksimal, mengingat hal-hal seperti waktu dan jarak tempuh harus dipertaruhkan dengan jauhnya lokasi rumah dari tempat kerja mereka."

Marcus membeberkan sejumlah tantangan, yang harus dihadapi pemerintah Indonesia guna merealisasikan hal tersebut.

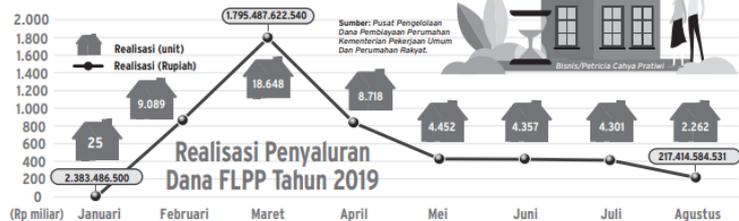
Tantangan pertama, menurutnya, masalah akses terhadap lahan, untuk memastikan bagaimana agar lahan-lahan yang berada di perkotaan tersebut bisa digunakan untuk program penyediaan perumahan.

Tantangan kedua, adalah kebutuhan akan tersedianya iklim kebijakan yang kondusif, yang bisa membantu upaya pengimplementasian masalah penyediaan perumahan bagi MBR.

"Yang ketiga adalah *government framework* dan tata kelola, bukan hanya dari sektor publik saja tapi juga sektor swasta," kata Marcus. □

Pembiayaan Rumah Untuk Rakyat

Pemerintah berupaya mengejar target program sejuta rumah yang tahun ini ditetapkan terbangun sebesar 1,25 juta unit. Namun, dengan melipisnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, pemerintah berniat mengoptimalkan program kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).



Judul	Gandeng Swasta demi Atasi Defisit Perumahan	Tanggal	Kamis, 15 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 13)		
Resume	Kementerian PUPR akan memangkas angka defisit atau backlog perumahan dari saat ini 7,6 juta unit menjadi 5 juta unit pada 2024.		

Gandeng Swasta demi Atasi Defisit Perumahan

APBN hanya mampu membiayai 30% dari total biaya pembangunan 3,9 juta rumah layak huni.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@medialindonesia.com

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan memangkas angka defisit atau *backlog* perumahan dari saat ini 7,6 juta unit menjadi 5 juta unit pada 2024.

"Itu sudah masuk Visium PU-Pera 2030 dengan penjabaran target sektor perumahan di 2020-2024, yaitu penurunan *backlog* menjadi 5 juta unit," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto dalam lokakarya tentang perumahan terjangkau di Jakarta, kemarin.

Dalam catatannya, saat ini sekitar 50% populasi Indonesia tinggal di perkotaan dan diperkirakan jumlah tersebut bakal mencapai 70% pada 2030 mendatang.

Jika tidak segera ditangani,

persoalan tempat tinggal yang tak layak, termasuk perkampungan padat di kota, masih akan menghantui dalam lima tahun ke depan.

Untuk mencapai target tersebut, sambung Eko, Program Sejuta Rumah (PSR) yang telah dimulai sejak 2015 akan kembali dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 3,9 juta hunian dengan nilai investasi Rp780 triliun diproyeksikan bisa terbangun dalam kurun waktu tersebut.

"Tetapi pemerintah tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran itu. Perlu ada kerja sama dengan sektor swasta untuk merealisasikan target tersebut," ucapnya.

Pemerintah, lanjutnya, hanya mampu mengeluarkan pendanaan sekitar 30% dari total kebutuhan Rp780 triliun tersebut. Sebanyak 70% diharapkan bisa datang dari pelaku usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pemerintah pun kini tengah menyiapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di sektor perumahan.

Skema yang sama sejatinya telah dilaksanakan untuk membangun jalan, jembatan,

dan fasilitas air minum.

"Dan sekarang kita akan coba skema itu untuk perumahan. Skema itu seharusnya bisa diterapkan untuk semua pembangunan infrastruktur," tandasnya.

Apresiasi Bank Dunia

Di acara yang sama, Bank Dunia mengapresiasi Program Sejuta Rumah yang digagas Kementerian PU-Pera tersebut.

Ekonom Urban Senior Bank Dunia, Marcus Lee, menyampaikan bahwa pemerintah memang dituntut membuat terobosan dalam pengadaan rumah yang layak di tengah keterbatasan kemampuan APBN.

"Target Program Sejuta Rumah adalah sebagai sarana mencapai tujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Marcus.

Marcus yang juga menjabat Koordinator Program Urban Indonesia Bank Indonesia (BI) itu juga menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak untuk menyediakan solusi bagi permasalahan perumahan, misalnya mencari lahan yang cukup guna menyelesaikan persoalan perumahan. (Ant/E-2)

Judul	PINA Tawarkan 30 Proyek Strategis	Tanggal	Kamis, 15 Agustus 2019
Media	Koran Tempo (Halaman ekonomi bisnis)		
Resume	Lembaga PINA Bappenas menggenjot penawaran 30 proyek energy, industry strategis, perkebunan dan manufaktur, hingga perumahan.		

EKONOMI DAN BISNIS

PINA Tawarkan 30 Proyek Strategis

Pembiayaan proyek infrastruktur tanpa anggaran negara kian meredak.

EDISI 15 AGUSTUS 2019



JAKARTA – Lembaga Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggenjot penawaran 30 proyek energi, industri strategis, perkebunan dan manufaktur, hingga perumahan.

Presiden Direktur PINA, Ekoputro Adijayanto, menargetkan penyelesaian pembiayaan Rp 80-100 triliun tahun ini. "Sepanjang tahun lalu sudah masuk Rp 47 triliun. Tentu target kami tahun ini lebih besar," kata dia di Gedung Tempo, kemarin.

Tahun lalu, PINA menyepakati pendanaan berbagai sektor, seperti pembangunan jalan tol sepanjang 700 kilometer serta pembangkit listrik 225 megawatt. Tahun ini, PINA mengejar kesepakatan pembiayaan untuk 30 proyek dengan investasi US\$ 50,9 miliar atau Rp 707,9 triliun.

Untuk menarik minat investor asing dan dalam negeri, Eko mengatakan perlu ada perbaikan iklim investasi infrastruktur, termasuk dengan cara memangkas aturan yang menghambat. "Harus kami gedor terus, mendiskusikan pengembangan kemudahan berbisnis."

Pemerintah tengah mengembangkan berbagai skema alternatif untuk mengurangi beban anggaran. Peran swasta diperkuat untuk menopang kebutuhan investasi infrastruktur Rp 6.000 triliun pada 2020-2024. Kebutuhannya melonjak 34 persen dari periode 2015-2019 sebesar Rp 4.796 triliun.

Eko menilai tantangan PINA lebih besar dibanding skema public private partnership atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang masih mendapat jaminan. "Tak ada guarantee pada proyek PINA, tapi rasio pengembalian investasinya kami patok di atas 13 persen," kata dia. "Yang rasionya 6-12 persen akan masuk KPBU."

Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas, mengatakan ada 80 proyek dari 11 sektor yang dikembangkan dengan skema KPBU. Adapun Direktur Finansial Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Joseph Sondang Tobing, mengatakan unitnya masih harus mengawal puluhan proyek strategis nasional (PSN) yang persiapannya belum juga rampung. Sepertiga dari 30 proyek yang tengah masuk radar PINA tahun ini merupakan PSN, seperti pengembangan aerocity Bandar Udara Kertajati senilai Rp 33 triliun, dan pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi senilai Rp 23 triliun. "Selalu kami monitor agar bisa segera masuk tahap transaksi, atau setidaknya sampai design engineering," katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan juga memasang target pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 3,9 juta unit untuk 2020-2024. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan kebutuhan untuk target tersebut mencapai Rp 780 triliun, sedangkan pemerintah hanya menyanggupi maksimal 30 persennya. "Keterlibatan swasta sudah bukan pilihan, tapi keharusan," katanya, kemarin.